KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Layanan jalan tol, operator wajib penuhi syarat SPM
Tanggal : Minggu, 09 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Layanan Jalan Tol

Operator Wajib Penuhi Syarat SPM

SENAYAN mendorong penyempurnaan dan sinkronisasi regulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol agar sesuai dengan perkembangan aturan terbaru. Penerapan SPM menjadi kunci dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol.

Anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto menegaskan, jalan tol memiliki karakter berbeda dengan jalan umum. Sebab, jalan tol menarik dana dari masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan harus sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan Badan Usaha Pengelola Jalan Tol (BUJT).

"SPM berhubungan langsung dengan kebijakan tarif jalan tol karena menjadi dasar pemenuhan kualitas layanan," ujar Sofwan dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Politikus Fraksi PDIP itu menyoroti adanya ketidaksinkronan antara aturan teknis dan aturan payung terkait penyesuaian tarif. Ia menjelaskan, regulasi teknis terakhir yang mengatur SPM jalan tol adalah Peraturan Menteri tahun 2014.

Artinya, sudah lebih dari sepuluh tahun belum direvisi, padahal undang-undang serta peraturan pemerintahnya sudah diperbarui. "Antara peraturan payung dan peraturan teknisnya belum sinkron. Itulah yang kami dorong untuk disesuaikan," tegasnya.

Dalam penerapan tarif tol, legislator asal Dapil Jateng VI itu meminta agar seluruh dasar penetapan dituangkan secara jelas dan terperinci dalam keputusan menteri. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Harus detail, supaya masyarakat bisa mengecek apakah kenaikannya melanggar peraturan pemerintah atau tidak," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menambahkan, pihaknya akan terus memastikan pemenuhan SPM di lapangan berjalan baik. SPM jalan tol bukan sekadar ukuran teknis, tetapi juga menyangkut hak publik pengguna jalan.

Melalui Panitia Kerja (Panja) SPM Jalan Tol, Komisi V DPR tengah fokus memantau kondisi di berbagai ruas tol. Pihaknya ingin memastikan seluruh operator memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. "Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan," tegas politikus PKB itu.

Huda juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), BUJT, dan Kementerian PUPR. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar setiap kekurangan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti.

"Kita ingin BPJT memberikan instruksi tegas kepada operator agar tidak menunda atau mengabaikan pelaksanaan SPM di ruas tol," jelasnya.

Ia menegaskan, selama SPM belum terpenuhi, kenaikan tarif tol tidak boleh dilakukan. Hal itu merupakan salah satu prasyarat yang tertulis jelas dalam regulasi yang berlaku. Karena itu, setiap penilaian BPJT atau Kementerian PUPR tidak boleh menoleransi kekurangan dalam pelaksanaan standar pelayanan. ■ PYB